

## IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DESA PURWASARI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

**Muhamad Subkhan**

e-mail: [muhamadsubkhan212@gmail.com](mailto:muhamadsubkhan212@gmail.com)  
STKIP Arrahmaniyah

### *Abstract*

*The main theory in this study is the theory of policy implementation according to Edward III in Agustino (2017: 136). This research uses a qualitative approach, where qualitative research is a research method that is shown to describe existing phenomena. The data collection in this study is based on reality in the field through observation, interviews and documentation. This study contained 6 informants as a key instrument of data collection consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Social Welfare Center (Pukesos), KIP distribution officer in school, and 2 beneficiary communities in Purwasari Village. From the results of research that has been done shows that the Implementation of smart Indonesia Card Policy (KIP) in improving the quality in Purwasari Village, Cicurug District, Sukabumi Regency has not been effective because there are still some obstacles in its implementation, such as the validity of the data owned is not synchronized between the existing data and the data in the center, because the data is still using old data, in addition, there are still people who should get the KIP program but do not get it because of data collection that has not been in verval (validation and verification). Therefore, the Purwasari Village Government and related parties need to make efforts by coordinating, meaning that in data collection regarding the Smart Indonesia Card (KIP) program in Purwasari Village can be coordinated effectively between related implementing institutions, so as to reduce data that is not on target.*

*Keywords: Implementation, Smart Indonesia Card, and Quality of Education.*

## Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan model implementasi dari Edward III (Agustino, 2017:136-141), dimana ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar, yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa, Operator penyaluran KIP di Sekolah, dan 2 orang penerima manfaat di Desa Purwasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam meningkatkan Kualitas Di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keabsahan data yang dimiliki tidak sinkron antara data yang ada dengan data yang ada dipusat, disebabkan karena datanya masih menggunakan data lama, selain itu masih terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan program KIP namun tidak mendapatkannya hal ini disebabkan oleh pendataan yang belum di verval (validasi dan verifikasi). Oleh karena itu Pemerintah Desa Purwasari dan pihak terkait perlu melakukan upaya dengan melakukan koordinasi, artinya dalam pendataan mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Purwasari bisa terkoordinir dengan efektif antara instansi pelaksana terkait, sehingga dapat mengurangi data yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Indonesia Pintar dan Kualitas Pendidikan.

---

Submitted: 18-02-2023 | Accepted: 28-02-2023 | Published: 28-02-2023

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sana kita bisa melihat bahwa kesejahteraan dan Pendidikan menjadi perhatian utama para pendiri negara Indonesia. Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki Pendidikan yang tinggi serta orang tidak dapat menjangkau Pendidikan tinggi karena miskin menjadi semacam lingkaran yang sulit diputus mata rantainya. Negara melakukan berbagai upaya untuk memutuskan mata rantai tersebut dengan membuat berbagai program peningkatan mutu Pendidikan dan memperluas kesempatan untuk mengakses Pendidikan bagi warga negara. Salah satu program pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan terutama dari kelompok masyarakat yang rentan atau miskin adalah Program Kartu Indonesia Pintar. Keberadaan program ini

bertujuan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah dikalangan anak yang sebetulnya masih dalam usia sekolah.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) meluncurkan program ini dengan tujuan untuk membantu siswa miskin dalam memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan bermanfaat bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku, serta tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kekurangan biaya.

Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang masing-masing siswa tersebut menerima bantuan dana dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp. 450.000,00 untuk siswa SD, Rp. 750.000,00 untuk siswa SMP, dan Rp. 1.000.000,00 untuk siswa SMA yang dana tersebut diberikan pertahun (perdua semester).

Dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar, diberbagai daerah masih ditemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Belum efektifnya sosialisasi yang diberikan.
2. Kurang efektifnya akurasi data yang dilakukan para pelaksana.
3. Kurang efektifnya sikap para pelaksana dalam pengawasan dana yang terberikan.
4. Belum efektifnya Standar Operating Prosedures (SOP) pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

## **2. Kajian Pustaka dan Kerang Berfikir**

### **2.1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III**

Implementasi kebijakan menurut Howleyt dan Ramesh dalam Mutiarin (2014: 20) didefinisikan sebagai:

*"The process whereby programs or policies are carried out it donates the translation of plans into praticice".* (Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek).

Penelitian ini mengambil teori model implementasi dari Edward III (Agustino, 2017:136-141), dimana kebijakan berspektif *top down*, dimana ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi,**

Ketika para pembuat keputusan sudah mengetahui, memahami dan menjalankan hal yang akan mereka kerjakan dengan baik, maka kemungkinan implementasi yang efektif akan terjadi. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

- 1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Pelaksana membutuhkan kejelasan informasi agar tujuan dari kebijakan dapat diraih sesuai dengan konteks kebijakan.
- 3) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan.

#### **b. Sumber Daya Manusia.**

Elemen yang menjadi indikator dari sumber daya yaitu :

- 1) Staf.

Sumber daya manusia utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan. Ketika kinerjanya tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya maka hal ini dapat menjadi penyebab kegagalan dari implementasi kebijakan.

- 2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Implementor

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

### 3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Penyurutan efektivitas mungkin dapat terjadi jika terjadi penyelewengan wewenang, semisal digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 4) Fasilitas

Dalam hal ini, fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dibutuhkan agar implementasi dari kebijakan atau program yang berjalan dapat terlaksana dengan baik.

## c. Disposisi

Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka selain mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal ini untuk menghindari kesalahan, kegagalan atau bias dari pelaksanaan.

Disposisi menurut Edward III, adalah:

### 1) Efek disposisi

Sikap dari para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan.

### 2) Melakukan pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy)

Menurut Edward III, pengaturan birokrasi juga salah satu syarat dari implementasi kebijakan. Hal ini merujuk pada penunjukan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kompetensinya.

### 3) Insentif

Pada umumnya orang bertindak sesuai dengan kepentingan tertentu. Kadangkala, memanipulasi insentif oleh para pemuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

#### **d. Struktur birokrasi.**

Beberapa kemungkinan dalam terealisasinya suatu kebijakan, dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Kelemahan dan kelebihan struktur birokrasi dapat menjadi penyebab juga, sekalipun sumberdaya mengetahui dan menginginkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Edward III, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu:

- 1) Membuat Standar Operating Procedures (SOP); adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan seperti aparat, administratif, atau birokrasi) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya (days-to-days politics) sesuai standar yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika struktur birokrasi sudah terfragmentasi, maka implementasi dimungkinkan akan lebih efektif karena pelaksanaannya menjadi lebih kompeten dan berkemampuan.

#### **1.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Kartu Indonesia Pintar**

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah implementasi dari Program Indonesia Pintar, dimana merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dan program agenda prioritas dari Presiden RI periode Pak Jokowi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia sekaligus revolusi karakter bangsa. proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

KIP disediakan berdasarkan Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembebanan pembiayaan pencetakan KIP disesuaikan dengan kuota dari direktorat jenderal terkait. Bantuan KIP ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

### **3. Objek dan Metode Penelitian.**

#### 3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala social dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

#### 3.2. Indikator Penelitian.

Indikator penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ada beberapa factor yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### 3.3. Unit Analisis dan Setting Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan KIP di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Pada penelitian ini observasi dan wawancara dilakukan secara *purposive*, yaitu orang-orang yang dinilai memiliki informasi terkait fenomena yang menjadi topik penelitian. Untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan, penelitian ini juga menggunakan metode snowball sampling dalam menentukan informan.

#### 3.4. Pengumpulan data

Observasi tidak terstruktur, wawancara mendalam semi terstruktur, dokumentasi dan triangulasi dipilih menjadi metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

#### 3.5. Validasi Data

Pengujian validasi data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui proses triangulasi.

#### 3.6. Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah diperoleh beberapa data untuk menganalisis permasalahan serta beberapa studi dokumentasi untuk melihat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Kualitas Di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Peneliti juga memperoleh data hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi diantaranya, Perangkat Desa, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa, Kepala Sekolah, dan Masyarakat Penerima Manfaat Kartu Indonesia Pintar di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Nara sumber ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Kualitas Di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Untuk mengetahui pembahasan hasil penelitian, ada beberapa langkah untuk menganalisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Teori mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penelitian yang mengacu pada teori yang di kemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2017:136-142) dimana terdapat empat dimensi atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi yang baik, Sumber Daya yang memadai, Disposisi yang jelas, dan Struktur Birokrasi yang handal.

Berdasarkan wawancara mengenai keempat dimensi Implementasi Kebijakan tersebut, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### **Dimensi Komunikasi**

Komunikasi adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Setiap keputusan kebijakan implementasi dapat ditransmisikan sebaik mungkin kepada perseorangan. Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan.

Informan Bapak H. Entis Sutrisna selaku kepala Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengemukakan bahwa:

“...Sejauh ini sudah cukup baik komunikasi program KIP ini sudah sesuai dengan aturan, ya kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat jelas dengan melakukan sosialisasi di waktu-waktu tertentu melalui perangkat Desa yang turun langsung kepada

masyarakat. Saya kira mengenai kendala pasti ada, tetapi kita sudah sesuaikan dengan aturan yang ada memberikan penjelasan yang sejelas- jelasnya yang diberikan kepada mereka sehingga mereka mengerti dan tau. Upayanya ya kita melakukan sosialisasi melalui lingkungan RT/RW kemudian kami juga berusaha selalu melakukan koordinasi kepihak lebih tinggi seperti ke pihak kecamatan..." (Hasil wawancara Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB).

Bapak Agus Setiagunawan selaku Sekretaris Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi menyatakan tentang komunikasi ini sebagai berikut:

"...Sudah cukup baik, di wilayah Desa Purwasari sudah terbilang sudah cukup baik. Di beberapa titik kita memang melakukan sosialisasi karena ada beberapa masyarakat yang bertanya yang akhirnya kami informasikan mengenai Kartu Indonesia Pintar dengan pegawai Desa yang memang berkompeten, juga ada kalanya di satu titik masyarakat membutuhkan kejelasan informasi kita langsung terjun kelapangan atau kelokasi untuk memberikan informasi kejelasan mengenai KIP ke masyarakat. Kendalanya di Desa Purwasari ini terdiri dari 32 ke RT an yang beraneka ragam masyarakat karena akhirnya kita harus meluangkan waktu untuk melakukan sosialisasi dengan skala walaupun mikro langsung pada masyarakat juga akhirnya menjadi makro saking banyaknya masyarakat kita jumlah atau populasi masyarakat kita dan cukup luas juga wilayah Desa Purwasari, tapi kita memiliki visi atau misi pengabdian kepada masyarakat tetep selama masyarakat membutuhkan kehadiran kami insyallah kita dapat membantu masyarakat. Upaya yang kami lakukan responsif tanda kutif undangan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai kejelasan KIP, cuman ada kalanya masyarakat tidak terlalu bisa menahan kesabaran, kami tekankan kepada masyarakat bahwa program apapun yang sifatnya membutuhkan proses tidak secepat atau semudah yang digambarkan..."

Informan Bapak M. Ikhyar Alyadi selaku Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakanpula bahwa:

"...Menurut saya ya untuk saat ini sudah cukup baik. Penyaluran imnformasinya melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait yang berhubungan dengan program KIP, ada juga masyarakat yang langsung datang ke Desa untuk menanyakan informasi tersebut. Kendalanya egos dari masyarakat itu sendiri terkadang orang yang tidak mampu ketika mau diberi bantuan KIP ini dia tidak mau, jadi kendalanya keterbatasan pendidikan yang kurang menyebabkan pemahaman dari masyarakat tentang kegunaan program KIP ini. Upayanya ya kita sebisa mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat seberusaha mungkin agar bisa membantu mereka..."

Informan lainnya yakni Ibu Emay Komariah S.Pd selaku Oprator Penyaluran KIP di Sekolah mengatakan bahwa:

"...Alhamdulillah sudah cukup baik ya komunikasinya hanya mungkin suka ada keterlambatan dari pusat melalui oprator pengurus KIP di sekolah. Penyampaian informasinya melalui sosialisasi setelah ada laporan dari pusat ke sekolah kita mengumpulkan orang tua lalu kita sampaikan arahan kepada mereka yang anaknya mendapatkan KIP. Kita inginya ada kerjasama ya dari bawah, dari pihak masyarakat sampai ke pihak pusat supaya sinkron tadi dibenahi datanya supaya jelas. Kendalanya tidak ada, memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tadi memberikan sosialisasi

agar orangtua lebih paham...”.

### **Dimensi Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai komponen utama sumber daya. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang paling penting didalam implementasi kebijakan yaitu dibutuhkan sumber daya implementor dan sumber daya finansial yang kompeten didalam pelaksanaan program agar tujuan dan kebijakan tercapai secara optimal.

Dimensi Sumber Daya Manusia menurut informan Bapak H. Entis Sutrisna selaku kepala Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

“...Ya SDM nya sudah cukup baik yaitu sesuai dengan apa yang dia terima dikarenakan bahwa ini berupa bantuankn dari pihak pemerintah jadi diusahakan supaya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang jelas saya sebagai Kepala Desa mengarahkan agar kemampuan SDM nya berjalan dengan baik. Saya rasa sarana dan prasarananya sudah cukup menunjang. Ya kita di samping tadi memberikan informasi, arahan kepada mereka ya kadang juga setelah kita upayakan memberikan arahan kepada mereka alhamdulillah tidak ada kendala beratlah tetapi tetep mengupayakan, mengusahakan, dan mengajukan mengambil langkah-langkah berikutnya kita tinggal diam mengajukan ke tingkat lebih tinggi lagi. Ya kembali lagi kepada sarana dan prasarana ya kita sesuai dengan apa adanya karena tidak diberikan oleh dinas yang jelas masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kepentingan KIP ini...”.

Informan Bapak Agus Setiagunawan selaku Sekretaris Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

“...Itu beraneka ragam ya ada yang memang secara cepat bisa memahami mengenai konten dari pada sosialisasi dari kita cuman kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ada saja memang masyarakat yang bertanya ulang dan kita perlu menjelaskan berulang-ulang sampai masyarakat paham. Jadi ketika kita melakukan edukasi atau informasi mengenai KIP itu sedetail mungkin bahasa-bahasa yang kita gunakan cukup diserap oleh semua lapisan masyarakat, jadi masyarakat bisa memahami kejelasan atau bentuk sosialisasi dari kita agar mudah dipahami masyarakat. Kami berjibaku dengan seluruh prangkat Desa terutama yang lebih berkompeten juga kami berkordinasi dengan kepala dusun agar dapat lebih spesifik di lokasi-lokasi dimana masyarakat membutuhkan informasi dan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan mengenai KIP ini...” (Hasil wawancara Jumat, 13 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB).

Informan Bapak M. Ikhyar Alyadi selaku Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan pula bahwa:

“...Kemampuan SDM nya sudah cukup baik, karena program kartu KIP untuk kebutuhan masyarakat di Desa Purwasari itu sebenarnya sudah terpenuhi. Kalo sekarang masih menggunakan data-data lama sih sebenarnya, kalo untuk pengajuan emang sudah

banyak cuman untuk penggunaan datanya masih menggunakan data lama, tapi dalam setahun penggunaan data pasti ada pembaruan mengikuti perkembangannya saja. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan paham dengan program KIP ini, upayanya ya kita memberikan informasi atau sosialisasi pemahaman mengenai KIP. Intinya dari penginputan data yang secara online, kendalanya ya dari komputer dan jaringan yang terkadang ketika penginputan data itu lama tidak masuk, ya kita seberusaha mungkin agar bisa diperhatikan lagi agar implementasi ini berjalan dengan baik..." (Hasil wawancara Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 11.30 WIB).

Informan Ibu Emay Komariah S.Pd selaku Operator Penyaluran KIP di Sekolah mengatakan bahwa:

"...Alhamdulillah sudah cukup baik ya komunikasinya hanya mungkin suka ada keterlambatan dari pusat melalui oprator pengurus KIP di sekolah. Penyampaian informasinya melalui sosialisasi setelah ada laporan dari pusat ke sekolah kita mengumpulkan orang tua lalu kita sampaikan arahan kepada mereka yang anaknya mendapatkan KIP. Kalo dari masyarakat masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan paham dengan program KIP ini, upayanya memberikan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengerti. Ya kalo sarana dan prasarana sudah cukup baik namun harus diperhatikan lagi agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan dengan baik..." (Hasil wawancara Jumat, 13 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB).

Informan Ibu Yuliati selaku masyarakat penerima manfaat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan:

"...Ya saya mengetahui dari media sosial dan sama dari sekolah juga. Banyak manfaatnya dan juga sangat membantu terutama masyarakat perekonomian kita yang lemah, ya itu uangnya untuk beli keperluan sekolah buat beli buku, sepatu. Sangat membantu sekali dengan adanya program KIP ini. Cukup baik sih, tapi kadang-kadang juga telat dari penanganannya kurang cekatan dari pihak para pelaksananya. Saranya pengunya sih diperpanjang tau sendiri gimana perekonomian sekarang rada susah, itu aja sih saranya pengen di perpanjang program kartu indonesia pintar ini sampai sekolah menengah atas. Alhamdulillah sudah tepat sasaran dan sangat membantu sekali..." (Hasil wawancara Rabu, 17 Mei 2022 Pukul 10.00).

### **Dimensi Disposisi**

Pemahaman tujuan program dengan adanya kejelasan dan mekanisme atas terlaksanya sebuah program akan memudahkan dalam pengaplikasian dan pengoperasionalan kegiatan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata jika personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai arahan pemegang kekuasaan.

Informan Bapak H. Entis Sutrisna selaku kepala Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengemukakan bahwa:

“...Menurut Kepala Desa di bantu oleh perangkat terutama yang ada hubungannya dengan masalah ini sudah cukup baik, kami sesuai dengan fungsinya kami terjun langsung kelapangan sudah cukup baik sikap dari para pelaksananya. Birokrasinya ya jelas yang pertama dari pemerintah pusat karena program KIP inikan di keluarkan oleh presiden, kita sesuai dengan alurnya mengikuti dengan apa yang sudah ditetapkan karena ada bagian-bagiannya dan kita tidak terlepas berkordinasi juga. Saya kira tidak ada kendala, sikap para pelaksana dalam pemahamannya sudah jelas karena sudah sesuai dengan tupoksinya, upayanya saya sebagai Kepala Desa memberikan komunikasi kepada mereka paling tidak ada yang perlu disampaikan atau tidak. Upayanya yaitu selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dan unsur-unsur terkait...” (Hasil wawancara Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB).

Informan Bapak Agus Setiagunawan selaku Sekretaris Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

“...Sudah cukup baik dan memahami, karena para pelaksanapun sudah terjun langsung kelapangan. Gini ya kita selaku fasilitator ya kita selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan kebijakan program ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan dari pihak pusat. Kendalanya tidak ada, selain melakukan evaluasi kamipun memonitor dan memastikan misalkan ada komplain kita reaktif, jadi kita tidak sepihak yang hanya mendengarkan komplek atau pengaduan saja yang jelas kita mencari data pembagi yang lain agar kita berjalan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan...” (Hasil wawancara Senin, 17 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB).

Informan Bapak M. Ikhyar Alyadi selaku Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan:

“...Kalo pemahaman para pelaksana sudah cukup baik karena sudah sesuai prosedurnya. Ya kita mengikuti alurnya dari pemerintah pusat menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada, kadang-kadang masyarakat dengan latar pendidikan rendah tidak tahu program ini sehingga menjadi hambatan dalam pemahaman sikap masyarakat. Karena tidak semua yang mendapatkan program KIP ini mendapatkan kartu, ada beberapa orang yang mendapatkan kartu tapi bantuannya tidak ada kenapa bantuannya tidak ada karena pihak oprator pusat tidak memasukan data tersebut padahal di data sikenji sudah masuk sebagai warga miskin sehingga tidak terdaftar. Ya upayanya harus diperhatikan lagi agar bisa efektif...” (Hasil wawancara Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 11.30 WIB).

Informan Ibu Emay Komariah S.Pd selaku Operator Penyaluran KIP di Sekolah mengatakan bahwa:

“...Alhamdulillah kalo pemahaman para pelaksana kompak sudah cukup baik, karena ini kan bantuan dari pemerintah untuk yang tidak mampu walaupun kategorinya masing ada yang tepat sasaran atau tidak tapi pemahaman sikap pelaksananya sudah cukup baik. Ya seperti itu tadi kita setelah ada laporan dari pusat saya biasanya ngemumpulkan tabungan KIP dulu karena kolektif itu ya dicek dulu ke bank apakah si buku tabunganya itu ada saldonya atau tidak khawatirnya gini dari pusat cair 20 orang pas yang cair di bank nya hanya 18 orang karena kasian kepada orangtuanya...”.

Namun ada juga masyarakat yang mengeluhkan bahwa dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih tidak tepat sasaran dan efektif karena masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan. Seperti yang di kemukakan oleh informan Ibu Enung Haryati selaku masyarakat penerima manfaat di Desa Purwasari sebagai berikut:

“...Ya saya mengetahui dari sekolah dan masyarakat juga. Iya sangat membantu untuk membeli buku, seragam, tas untuk keperluan sekolah apalagi masyarakat seperti saya jadi sangat cukup membantu manfaat dari pemberian program KIP ini. Ya cukup baik, karena para pelaksana udah ngurusin segalanya ngasih tau dan memberikan sosialisasi dari sekolah. Untuk kedepannya ada yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar jadi harus kebagian, harus ada pendataan ulang kembali supaya orang yang lebih membutuhkan mendapatkannya. Karena belum sepenuhnya tepat sasaran soalnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KIP itu...” (Hasil wawancara Rabu, 17 Mei 2022 Pukul 10.30).

### **Dimensi Struktur Birokrasi**

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pembuatan Standar Operating Procedures (SOP) yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaan fragmentasi dibutuhkan agar dapat menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas atau program pada beberapa unit kerja pada bidangnya masing-masing.

Informan Bapak H. Entis Sutrisna selaku kepala Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengemukakan bahwa:

“...Ya menurut saya sudah standar dengan SOP nya, karena kami terpaku kepada aturan yang ada yang sudah disediakan. Tanggung jawabnya para pelaksana sudah baik, pertama yang mendapatkan kartu tersebut ya setelah mendapatkan diberirikan oleh para pelaksana kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan menandatangani serah terima, itu merupakan salah satu pertanggung jawaban para pelaksana. Sejauh ini tidak ada kendala untuk pengimplementasia program ini karena selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, upayanya kita selalu mengikuti sesuai dengan prosedur. Upayanya selalu meningkatkan lagi tupoksinya supaya tidak ada kendala...” Hasil wawancara Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB).

Informan Bapak Agus Setiagunawan selaku Sekretaris Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

“...Sudah sesuai dengan SOP sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pelaksana cukup tanggungjawab dan cukup responsif terhadap keluhan atau komplek-komplek atau kejelasan informasi mengenai KIP itu sendiri. Kendalanya yaitu dia

pemahaman masyarakat terhadap program KIP ini beraneka ragam, mudah-mudahan pemerintah pusat dapat memberikan publikasi ataupun hal-hal yang bersifat informatif lebih rutin lagi agar segala lapisan masyarakat khususnya di Desa Purwasari tidak terlalu bertanya-tanya tidak terlalu tidak memahami, jadi semakin banyaknya informasi, semakin banyaknya publikasi memudahkan kami pihak Desa untuk lebih memberikan informasi sesuai dengan informasi yang memang sesuai dengan SOP. Upayanya kami selaku pelaksana memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan saling komunikasi untuk memberikan informasi...”.

Informan Bapak M. Ikhyar Alyadi selaku Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengatakan:

“...Sudah sesuai prosedur SOP, karena yang mendapatkan program ini atas dasar usulan RT bahwa orang tersebut tidak mampu kami langsung ke lokasi mendatangi warga tersebut benar atau tidak bahwa dia tidak mampu ketika benar dan kemudian kami ajukan sesuai dengan prosedur. Sangat bertanggung jawab karena penyelenggara bertanggung jawab penuh pada program KIP ini seberusaha mungkin memberikan yang terbaik. Dari penyelenggara hambatannya dari kartu KIP yang mendapatkan namun dananya tidak ada, upayanya meningkatkan tupoksi masing-masing unsur terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan KIP ini agar pendataanya tepat. upayanya untuk pengimplementasian KIP ini melakukan penyuluhan setiap bulan dilakukan kepada masyarakat agar sesuai prosedur...” (Hasil wawancara jumat, 13 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB).

Informan Ibu Emay Komariah S.Pd selaku Operator Penyaluran KIP di Sekolah mengatakan bahwa:

“...Alhamdulillah sudah sesuai prosedur SOP, asalkan dari sananya lancar kita mematuhi aturan-aturan yang ada serta ada bukti fisiknya untuk laporan. Kalau tanggung jawab pelaksana kita kalo ada bantuan dari pemerintah kita langsung sampaikan kepada orang tua yang bersangkutan tidak ada kepentingan pribadi atau sekolah, itu murni untuk membantu orang tua yang kurang mampu dan nanti kita selalu arahkan. Pengenya kita dari pusat ada kejelasan siswa yang dapat KIP itu satu tahun berapa kali keluarnya, lalu dari pusat itu jelas tepat sasaran orang-orangnya supaya keadilan yang merata dan orang tidak mampu itu dapat merasakanya...” (Hasil wawancara Jumat, 13 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB).

Pembahasan penelitian disusun berdasarkan deskripsi hasil penelitian. Penelitian melakukan analisis berdasarkan data lapangan yang dihubungkan dengan konsep penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan maka penulis menganalisis empat dimensi implementasi kebijakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### **Analisis Dimensi Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain, komunikasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat

keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) sebaik mungkin kepada perseorangan atau kelompok.

Komunikasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Purwasari kurang efektif, karena proses komunikasi terkendala oleh pemahaman masyarakat yang kurang mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Itu menyebabkan keterbatasan pendidikan masyarakat yang relatif kurang sehingga komunikasi belum berjalan secara efektif dan sosialisasi yang berikan oleh Pemerintah Desa maupun Sekolah kepada masyarakat hanya diwaktu waktu tertentu saja tidak bersakala. Oleh sebab itu Pemerintah Desa maupun pihak sekolah harus lebih gencar lagi dalam pemberian pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai program KIP agar penyampaian informasi dapat menyeluruh dan masyarakat bisa lebih memahami walaupun tidak semua masyarakat memahami apa yang disampaikan.

### **Analisis Terhadap Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan dimensi utama yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan pengelolaan sumber daya (kesuksesan SDM) yang baik akan meningkatkan kesejahteraan yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai inflementor perlu didukung dengan fasilitas atau sarana prasarana yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Antara lain dukungan pendanaan (anggaran).

Dari hasil penelitian dilapangan mengenai Sumber Daya dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum optimal, dikarenakan sarana dan prasaranya kurang efektif serta para pelaksana dalam pendataan kurang berkoordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait sehingga data yang digunakan masih menggunakan data lama yang menyebabkan masih terdapat ketidak tepatan sasaran dari pemberian program KIP tersebut, sehingga Sumber Daya dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum efektif.

### **Analisis Dimensi Disposisi**

Selanjutnya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Sikap para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Desa Purwasari sudah cukup baik dalam arti pelaksana sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan walaupun terkendala dari masyarakatnya itu sendiri yang kurang memahami program KIP ini.

### **Analisis Dimensi Stuktur Birokrasi**

Dari hasil penelitian dilapangan, stuktur birokrasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Puwasari Kecamatan Cicurug sudah berjalan baik atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Langkah-langkah sebagaimana digariskan dalam pedoman pelaksanaan program telah dilaksanakan. Mulai dari tahapan sosialisasi, proses interalisasi para pelaksana program, telah dilakukan sesuai pedoman. Masyarakat penerima manfaat sudah diberikan sedemikian rupa beragam informasi tentang program KIP. Namun masih kurangnya koordinasi dari pihak pusat kepada sekolah mengenai pencairan dana.

## **5. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keabsahan data yang dimiliki tidak sinkron antara data yang ada dengan data yang dipusat, disebabkan karena datanya masih menggunakan data lama, selain itu masih terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan program KIP namun tidak mendapatkannya hal ini disebabkan oleh pendataan yang belum di verval (validasi dan verifikasi).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diantaranya:
  - a) *Komunikasi*, Kurang efektifnya kejelasan komunikasi dalam sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara langsung, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman yang di miliki masyarakat mengenai KIP yang menyebabkan masyarakat selalu bertanya ulang.

- b) *Sumber Daya*, Kuantitas masyarakat yang menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Purwasari dinilai belum optimal, disebabkan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana mengenai pendataan.
  - c) *Disposisi*, Pemahaman sikap para pelaksana mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini cukup baik, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan memahami mafaat program dari KIP ini.
  - d) *Struktur Birokrasi*, Struktur birokrasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) cukup baik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun masih kurangnya koordinasi dari pihak pusat kepada sekolah mengenai pencairan dana.
3. Upaya yang dilakukan dalam implementasi KIP ini diantaranya:
- a) Melakukan koordinasi, artinya dalam pendataan mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Purwasari bisa terkoordinir dengan efektif antara instansi pelaksana terkait, sehingga dapat mengurangi data yang tidak tepat sasaran.
  - b) Memberikan sosialisasi dan komunikasi baik secara langsung mau tidak langsung kepada masyarakat dengan baik antar pihak agar ada terjadinya timbal balik sehingga informasi berjalan dengan efektif.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang, Jatim: Intrans Publishing.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, Dyah dan Arif, Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Purwanto, Agus Erwan. Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaruperss
- Susanto, Pendi. 2016. *Produktivitas Sekolah Teori Untuk Praktik di Tingkat Satuan Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Nasional.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alvabeta.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alvabeta.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wicaksono, Widya, Ristian. 2006. *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

**Lampiran Sumber Hukum:**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 Ayat (2).

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Kartu Indonesia Pintar.